

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN

Keny Karina Adisty¹, Kiki Endah², Ii Sujai³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁾²⁾³⁾

e-mail: keny.karina@gmail.com¹, kikiendah1212@gmail.com²,
sudjaipnd79@gmail.com³

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masyarakat nelayan di Desa Pangandaran memiliki permasalahan dalam pengelolaan sumber daya dan perekonomian yang salah satunya karena terbatasnya akses masyarakat nelayan ke perbankan yang berdampak pada modal usaha masyarakat nelayan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran sudah berjalan dilihat dari indikator adanya pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan, adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis, kolaborasi antara pemerintah masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan peraturan yang adil dan dapat diterapkan, melakukan evaluasi dan edukasi terkait dengan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap aspek-aspek sistem kesadaran kebijakan lingkungan, dan penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Akan tetapi masih belum optimal karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan diantaranya belum adanya pelatihan pengolahan ikan dan belum adanya program untuk pencegahan overfishing, belum adanya kepatuhan masyarakat nelayan sehingga masih adanya pelanggaran terhadap regulasi.

Kata Kunci: *Penguatan Kelembagaan; Pemberdayaan; Nelayan*

PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia terdiri dari sekitar 17.504 pulau besar dan kecil yang tersebar pada garis lintang 60 hingga 110 lintang selatan dan bujur 920 hingga 1420 bujur timur. Dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada yaitu 95.161 km, sebagian besar wilayah daratannya – 5,9 juta km² – berada di perairan.

Secara lebih eksplisit, sektor kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diakui sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Meskipun demikian, meskipun potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan sangat besar, pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terpadu dan berbasis ekosistem agar sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pusat pembangunan nasional (Indarti & Dwiyadi, 2003).

Salah satu segmen masyarakat Indonesia yang bergantung pada pengelolaan sumber daya perikanan yang prospektif adalah masyarakat nelayan. Desa-desa nelayan memiliki ciri-ciri sosial unik yang membedakan mereka dari masyarakat daratan karena lokasinya yang berada di laut. Struktur masyarakatnya beragam, memiliki etos kerja yang kuat, solidaritas yang kuat, mudah beradaptasi terhadap perubahan, dan menunjukkan kontak sosial yang mendalam di sejumlah lokasi pesisir yang berkembang sangat pesat.

Keberhasilan pertumbuhan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pemerataan pemerintah dalam merumuskan atau menerapkan kebijakan dalam menanggapi tantangan yang dihadapi. Tujuan pembangunan adalah untuk mendorong perubahan masyarakat yang disengaja, terorganisir, dan diatur. Masyarakat dapat dimobilisasi melalui perencanaan dan pengawasan rutin untuk menghasilkan perbaikan yang akan meningkatkan taraf hidup mereka.

Masyarakat yang bermukim di Dusun Pangandaran, satu-satunya dusun di Kabupaten Pangandaran yang posisinya berada di tepi pantai, mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Nelayan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran yang terdaftar menjadi anggota KUD Minasari Pangandaran berjumlah 614 orang: 578 laki-laki dan 36 perempuan. Sumber pendapatan utama masyarakat nelayan adalah hasil tangkapan yang dijual kepada keranjang atau perantara yang karena kewajibannya berdasarkan perjanjian pinjaman, memberikan modal usaha dengan harga yang sangat rendah dibandingkan kepada pengguna akhir secara langsung.

Hal ini konsisten dengan temuan studi Hidayat (2012) yang menunjukkan bahwa komunitas nelayan secara historis memiliki posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan pekerjaan lain. Peningkatan kesejahteraan nelayan setiap tahunnya. Hal ini memprihatinkan karena selain wilayah penangkapan ikan yang semakin sempit dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, target penangkapan ikan yang semakin menurun bahkan penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) sudah mencapai titik yang berlebihan, serta diakibatkan oleh aktivitas manusia dan bencana alam. membahayakan lingkungan dan ekosistem perairan.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan kepentingan dalam segala bidang kehidupan, serta

menerjemahkan kemajuan masyarakat menjadi kekuatan masyarakat yang sesungguhnya. Peningkatan kapasitas atau kemandirian masyarakat disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melibatkan lebih dari sekedar memperkuat masyarakat dan struktur sosial.

Desa Pangandaran yang berpenduduk 9.193 jiwa merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Pangandaran yang posisi garis pantainya lima meter di atas permukaan laut, menurut data statistik Kabupaten Pangandaran (2022). Mayoritas penduduk dusun tersebut adalah nelayan. Di Desa Pangandaran, upaya dilakukan untuk meningkatkan struktur kelembagaan dan kemampuan yang terkait dengan industri perikanan dengan memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat nelayan pesisir. Meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, menjaga sumber daya alam pesisir, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim adalah tiga tujuan utama pengembangan lembaga-lembaga ini. Tujuan dari pengembangan kelembagaan masyarakat nelayan pesisir adalah untuk memberikan mereka kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan komunitas nelayan, menjaga sumber daya alam pesisir, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim adalah tiga tujuan utama pengembangan lembaga-lembaga ini. Peningkatan kemampuan masyarakat nelayan pesisir dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan menjadi tujuan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan observasi di lapangan, bahwa penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator-indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi, terutama dalam penjualan hasil tangkapan, dapat menghambat kesejahteraan masyarakat nelayan.
2. Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dan penumbuhan sistem kesadaran di kalangan masyarakat nelayan dapat mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya perikanan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada proses di mana individu dan kelompok masyarakat diberikan kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya untuk mengambil keputusan dan mengelola aspek kehidupan mereka secara lebih efektif. pemberdayaan melibatkan peningkatan kontrol individu atas sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan ini mencakup:

- a. Peningkatan Kapasitas.
Melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan.
- b. Penguatan Akses.
Memperbaiki akses ke informasi, teknologi, dan pasar.
- c. Partisipasi.
Meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

2. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan proses memperbaiki struktur, fungsi, dan kapasitas organisasi atau lembaga yang ada di masyarakat. Menurut North (1990), kelembagaan yang kuat mampu memberikan stabilitas dan mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Penguatan kelembagaan melibatkan:

- a. Peningkatan Kapasitas Organisasi.
Pengembangan keterampilan manajerial, teknis, dan administratif.
- b. Peningkatan Partisipasi dan Akuntabilitas.
Mendorong transparansi dan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Pengembangan Jaringan dan Kemitraan.
Membangun hubungan yang efektif antara lembaga lokal, pemerintah, dan sektor swasta.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif menurut Sugiyono (2018:9) bahwa, Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulas (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan berhasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, Pengurus Koperasi Unit Desa (Minasari), Ketua RN (Rukun Nelayan) Masyarakat nelayan 4 orang sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan kelembagaan atau *capacity building*, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek yaitu, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses, proses tersebut dilaksanakan pada tiga tingkatan (individu, kelompok, dan institusi

atau organisasi), proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelancaran organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya. Hal ini sesuai dengan pendapat Endah, K. (2020:136) yang menyatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan berpusat pada masyarakat sebagai subyek pembangunan. Apabila melihat kondisinya ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga perlu ada peningkatan harkat serta martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri.

Sebagai salah satu bentuk penguatan kelembagaan nelayan di Pangandaran adalah pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir pantai. Menurut Muyungi Mutiarin, 2014, dalam (Budiman, 2018) bahwa terdapat 3 (tiga) fokus terkait penguatan kelembagaan, yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan SDM dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan urgensi pengembangan sumber daya manusia dikalangan masyarakat nelayan pesisir. Pendekatan ini mencakup upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat nelayan melalui program pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, penelitian ini melihat bahwa penguatan kelembagaan dapat dicapai melalui pemberdayaan individu dalam komunitas tersebut.

Dari hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan indikator adanya pelatihan pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut belum optimal, untuk pelatihan pencegahan *overfishing* belum pernah dilaksanakan, karena di pantai Pangandaran masih aman dari *overfishing*.

Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan indikator adanya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut belum optimal, terdapat keputusan Menteri No. 1 Tahun 2022, bahwa wilayah Pangandaran itu sudah menjadi wilayah konservasi perairan, khususnya untuk biota lobster dan juga penyu, namun pelatihan terhadap sumber daya manusia hanya sebatas pelatihan penggunaan teknologi yang aman dan dapat menunjang pendapatan para nelayan saja yang termask pada anggaran program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan indikator adanya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut belum optimal, meskipun telah ada keputusan Menteri No. 1 Tahun 2022 yang menetapkan Pangandaran sebagai wilayah konservasi perairan, fokus pelatihan yang dilaksanakan lebih cenderung pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan, bukan pada pengelolaan yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem laut. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pelatihan yang

tersedia terutama berfokus pada teknologi seperti penggunaan GPS dan *fish finder*, yang dapat membantu nelayan menemukan dan menangkap ikan dengan lebih efisien. Namun, aspek-aspek penting seperti strategi pengelolaan yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut, terutama di dalam wilayah konservasi seperti untuk biota lobster dan penyu, belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada nelayan dan stakeholders terkait lainnya di Pangandaran. Pelatihan harus diperluas untuk mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini penting agar kebijakan konservasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi ekosistem laut serta keberlanjutan sumber daya perikanan lokal.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan pada indikator adanya pelatihan pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut adalah belum tersedianya anggaran untuk pelatihan tersebut, yang sudah masuk dalam prioritas anggaran hanya pelatihan penggunaan alat yang ramah lingkungan, selebihnya untuk anggaran pelatihan lainnya belum tersedia.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dengan indikator adanya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yaitu berupaya memasukan pelatihan pengolahan sumber daya laut untuk mencegah *overfishing* kedalam program pelatihan prioritas, selebihnya upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat atau rukun nelayan mengenai pencegahan *overfishing*, serta implementasi keputusan Menteri Kelautan Republik Indonesia.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa mengenai dimensi yang pertama yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bahwa pada indikator adanya pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan pesisir belum optimal, dari indikator adanya pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan sudah optimal, selanjutnya dari indikator adanya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut belum optimal.

Selanjutnya dari keseluruhan hasil penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat disimpulkan bahwa dari semua indikator secara keseluruhan belum optimal serta belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Alfitri, 2011) bahwa:

Pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan).

Berdasarkan penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan pemberdayaan sumber daya manusia, salah satunya melalui Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia dalam konteks ini adalah nelayan pesisir Pangandaran secara keseluruhan belum mencapai tahap optimal, pada pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan pesisir belum optimal, pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan sudah optimal, selanjutnya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga keseimbangan ekosistem laut belum optimal. Implementasi dilapangan masih menemui beberapa kendala, harapannya pemerintah dapat berupaya untuk memenuhi atau melakukan perencanaan anggaran yang nantinya diajukan sebagai program prioritas untuk kedepannya.

2. Penguatan Institusi Melalui Penyempurnaan Prosedur dan Metode Dalam Organisasi

Penguatan institusi dalam konteks penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi menjadi relevan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan pesisir. Pengembangan kebijakan, prosedur, dan metode yang efektif dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan kegiatan nelayan. Oleh karena itu, teori ini memberikan landasan konseptual bagi penelitian untuk menggali potensi penguatan institusi dalam meningkatkan kondisi kelembagaan masyarakat nelayan pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa dimensi penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi pada indikator adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis sudah optimal, hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beragam fasilitas akses yang tersedia bagi organisasi nelayan di Kabupaten Pangandaran. Pengelola TPI seperti KUD Minasari, memberikan akses penuh kepada nelayan untuk informasi dan layanan teknis, termasuk program penanganan rantai dingin. Rukun Nelayan juga memainkan peran penting sebagai jembatan antara nelayan dan pemerintah, menyediakan berbagai layanan dan mendengarkan aspirasi nelayan. Kerjasama antara nelayan, Rukun Nelayan, dan pengurus KUD dalam koordinasi dan komunikasi juga terlihat kuat.

Adapun hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa dimensi penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi pada indikator adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis sudah optimal, fasilitas akses bagi organisasi nelayan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Pengelola TPI, Rukun Nelayan, dan koperasi nelayan menyediakan berbagai layanan dan dukungan, termasuk pelatihan teknis, bantuan permodalan, dan koordinasi dengan pemerintah. Kerjasama yang baik antara semua pihak memastikan bahwa nelayan memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan pendukung. Pemberdayaan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan pendapatan masyarakat (Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam

organisasi pada indikator adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis sudah mencapai tingkat optimal, Fasilitas akses yang tersedia bagi organisasi nelayan, seperti yang disediakan oleh pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Rukun Nelayan, terlihat memadai. Pengelola TPI, seperti KUD Minasari, memberikan akses penuh kepada nelayan untuk informasi dan layanan teknis, termasuk program penanganan rantai dingin yang penting untuk mempertahankan kualitas hasil tangkapan. Rukun Nelayan juga berperan sebagai perantara yang efektif antara nelayan dan pemerintah, menyediakan berbagai layanan dan mendengarkan aspirasi nelayan. Kerjasama antara nelayan, Rukun Nelayan, dan pengurus KUD dalam koordinasi dan komunikasi terlihat kuat. Hal tersebut memastikan bahwa nelayan tidak hanya memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan teknis dan dukungan lainnya, tetapi juga mendapatkan bantuan permodalan dan koordinasi dengan pemerintah secara efektif.

Dengan demikian, Kabupaten Pangandaran telah berhasil menyediakan infrastruktur organisasional yang solid untuk mendukung pengembangan nelayan melalui pelatihan teknis dan layanan pendukung lainnya. Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan di sektor perikanan, serta memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dari hasil penelitian pada dimensi penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi secara keseluruhan dari semua indikator belum mencapai tahap optimal, pada indikator prosedur kepada masyarakat nelayan untuk menjual hasil tangkapan ke pelelangan belum mencapai tahap optimal, selanjutnya pada indikator peningkatan dalam tingkat kepatuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku dengan adanya sanksi belum mencapai tahap optimal, hanya saja pada indikator adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis sudah terlihat optimal.

Hal tersebut belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keban (2009) dalam (Resmiati, Suryadi, & Indrawan, 2019) menyatakan bahwa, Penguatan kelembagaan adalah seperangkat strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab manajemen dengan menitikberatkan pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Dari hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penguatan kelembagaan perlu memperhatikan regulasi terkait prosedur yang mengatur organisasi, tingkat kepatuhan organisasi terhadap regulasi tersebut, aspek selanjutnya tersedianya fasilitas akses yang bisa di akses atau dimanfaatkan oleh organisasi, sehingga menjadi organisasi yang efektif, bertanggungjawab, dan akhirnya menjadi organisasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Penumbuhan Kapasitas Sistem Seperti Penumbuhan Sistem Kesadaran, Peraturan yang Kondusif dan Pengelolaan Sistem Lingkungan

Penumbuhan kapasitas sistem menjadi penting dalam merancang strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan merupakan elemen-elemen kunci untuk

menciptakan lingkungan yang mendukung penguatan kelembagaan. Dengan mendasarkan penelitian pada kerangka teoretis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang intervensi dan program pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan dapat diketahui bahwa pada dimensi penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sudah optimal, dapat dibuktikan dengan upaya penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan telah menjadi fokus utama bagi para nelayan di Pangandaran. Mereka telah aktif mendorong penggunaan alat tangkap yang lebih selektif dan ramah lingkungan, seperti jaring insang, serta memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada sesama nelayan untuk memastikan implementasi yang baik. Selain itu, kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut demi kelangsungan hidup masa depan telah menjadi nilai yang kuat di kalangan nelayan, yang tercermin dalam kesepakatan mereka untuk tidak menggunakan alat penangkapan yang merusak lingkungan.

Adapun hasil observasi dilapangan dapat dilihat bahwa dimensi penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sudah optimal, dapat dilihat bahwa nelayan pesisir Pangandaran secara aktif menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Mereka menggunakan alat tangkap seperti jaring insang dengan ukuran yang tepat, menghindari penangkapan secara besar-besaran, dan memastikan tidak merusak terumbu karang atau habitat laut lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga ekosistem laut dan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sudah mencapai tahap optimal, upaya penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan telah didukung oleh berbagai lembaga riset dan pengembangan, serta regulasi pemerintah yang melarang penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Hal tersebut mencakup identifikasi dan pengujian teknologi baru yang lebih ramah lingkungan serta promosi adopsi teknologi tersebut dilapangan. Para nelayan di Pangandaran juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan jaring insang yang selektif dan menghindari praktik penangkapan besar-besaran. Selain itu mereka juga aktif memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada sesama nelayan untuk memastikan implementasi teknologi ini berjalan dengan baik. Hal tersebut mencerminkan kesadaran yang kuat akan pentingnya menjaga ekosistem laut untuk keberlangsungan sumber daya ikan di masa depan.

Dari hasil penelitian dimensi penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dapat diketahui bahwa Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, adanya program edukasi dan pelatihan telah berhasil meningkatkan pemahaman tentang teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan di kalangan nelayan dan pelaku industri.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan secara keseluruhan sudah mencapai tahap optimal, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan peraturan yang adil dan dapat diterapkan sudah mencapai tingkat optimal, pada indikator melakukan evaluasi dan adukasi terkait dengan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap aspek-aspek sistem kesadaran, kebijakan dan lingkungan sudah optimal, indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sudah mencapai tahap optimal. Hal tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Millen, 2004, dalam (Budiman, 2018) yang berpendapat bahwa: "Penguatan kelembagaan atau *capacity building* merupakan tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu". Secara garis besar Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dari keseluruhan dimensi dan indikator diketahui bahwa dalam dimensi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan terdapat indikator yang sudah optimal yaitu indikator adanya pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan, tetapi terdapat indikator yang belum optimal yaitu adanya pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan pesisir, dan adanya pelatihan mengenai pengelolaan sumber daya laut yang bertujuan untuk mencegah overfishing dan menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Kemudian dalam dimensi Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi terdapat indikator yang sudah optimal yaitu adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis. Selanjutnya indikator yang belum optimal yaitu adanya prosedur kepada masyarakat nelayan untuk menjual hasil tangkapan ke pelelangan, dan adanya peningkatan dalam tingkat kepatuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku dengan adanya sanksi.

Selanjutnya pada dimensi Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan semua indikator sudah berjalan dengan optimal yaitu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan peraturan yang adil dan dapat diterapkan, melakukan evaluasi dan adukasi terkait dengan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

nelayan terhadap aspek-aspek sistem kesadaran, kebijakan dan lingkungan, dan penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Penguatan Kelembagaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran sudah berjalan dilihat dari indikator adanya pelatihan tentang penanganan alat tangkap ikan yang aman dan ramah lingkungan, adanya fasilitas akses organisasi nelayan terhadap pelayanan pendukung seperti pelatihan teknis, kolaborasi antara pemerintah masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan peraturan yang adil dan dapat diterapkan, melakukan evaluasi dan edukasi terkait dengan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap aspek-aspek sistem kesadaran kebijakan lingkungan, dan penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif dan pengelolaan sistem lingkungan pada indikator penerapan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Akan tetapi masih belum optimal karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan diantaranya belum adanya pelatihan pengolahan ikan dan belum adanya program untuk pencegahan *overfishing*, belum adanya kepatuhan masyarakat nelayan sehingga masih adanya pelanggaran terhadap regulasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam permasalahan tersebut diatas diantaranya adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan Pendidikan dan pelatihan, belum adanya program berkaitan dengan *overfishing*, masih adanya transaksi diluar Tempat Pelelangan Ikan (TPI), adanya keterikatan nelayan dengan pihak lain selain Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu pengepul ikan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut maka upaya yang dilakukan diantaranya dialokasikannya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pengolahan ikan, dibuatkannya sosialisasi regulasi tentang penjualan hasil tangkapan ikan, dan diterapkannya sanksi bagi pelanggaran terhadap regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangandaran, 2023. *Kecamatan Pangandaran Dalam Angka 2023*. Pangandaran : Badan Pusat Statistik

Budiman, R., Achsani, N. A., & Ismal, R. 2018. *Risiko pembiayaan dan determinannya pada perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM), 4(1), 151-151.

Hidayat Syamsul, 2012, *Koperasi Nelayan dan Pelestarian Lingkungan*, Kompasiana.

Indarti, I., & Wardana, D. S. 2013. *Metode pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan di wilayah pesisir kota Semarang*. BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis. Volume 17 No. 1 hal. 75-88.

Kiki Endah. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa*. Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 1, Februari 2020.

Novianti, F. A., Nursetiawan, I., Sobari, M., Risnawati, R., & Saputra, U. I. (2024). *Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya*. *Manfaat: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 52-59.

Resmiati, E., Suryadi, S., & Indrawan, R. 2019. *Penguatan Kelembagaan Teaching Factory Berbasis Potensi Wilayah Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Banten*.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.